

Pelatihan dan Penyuluhan Sertifikasi Desa Wisata di Desa Cibuntu

Fachrul Husain Habibie^{1*}, Willy Arafah², Amalia Mustika³, Heny Ratnaningtyas⁴

^{1,3,4}Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

²Universitas Trisakti

*fachrul@stptrisakti.ac.id

Informasi Artikel

Dikirim: 15 Desember 2021

Diterima: 22 Desember 2021

Dipublikasi: 23 Desember 2021

Keywords:

Tourism

Operational

Tourism

Certification

Village

Standards,

Village

Abstract

Tourism village certification is part of the framework of the sustainable tourism development program or Indonesian sustainable tourism. The purpose of this research is that village managers and the community will understand the importance of tourism village certification which guarantees to tourists the quality of tourist village destinations. The method of activity used in this activity is counseling and training. This service activity was carried out at the Cibuntu Village Hall starting at 08.00 to 13.00, which was attended by 20 participants. It is hoped that this service activity will make the managers and the tourism village community better understand the concept of quality assurance for good tourism village management, including the process of establishing and fulfilling management quality standards in a consistent and sustainable manner, so that consumers, producers, and stakeholders get satisfaction.

Kata Kunci:

Standar Operasional Desa

Wisata, Sertifikasi Desa

Wisata

Abstrak

Sertifikasi desa wisata merupakan bagian dari kerangka program pengembangan kepariwisataan berkelanjutan atau *sustainable tourism* Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah agar pengelola desa dan masyarakat akan memahami pentingnya sertifikasi desa wisata yang memberikan jaminan kepada para wisatawan akan kualitas destinasi desa wisata. Metode kegiatan yang digunakan pada kegiatan ini adalah penyuluhan dan pelatihan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Pendopo Desa Cibuntu dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan 13.00, yang dihadiri 20 peserta. Kegiatan pengabdian ini diharapkan para pengelola dan masyarakat desa wisata lebih memahami konsep penjaminan mutu pengelolaan desa wisata yang baik meliputi proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak stakeholders memperoleh kepuasan.

PENDAHULUAN

Desa Cibuntu ada di lereng gunung Ciremai yang letaknya di Kabupaten Kuningan ujung barat, dimana banyak situs-situs, yang sejarahnya merupakan tempat perjuangan para wali menyebarkan Agama Islam di Jawa Barat. Kegiatan wisata yang dilakukan wisatawan di Desa Cibuntu adalah agrowisata, sepeda gunung, wisata sejarah dan terdapat homestay serta banyak sekali masakan khas Desa Cibuntu (Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2021).

Kami Tim Pengabdian STP Trisakti berkunjung ke Desa Wisata Cibuntu karena pada tahun 2016, Desa Cibuntu pernah menjuarai desa wisata terbaik tingkat ASEAN peringkat kelima kategori bidang *homestay* (Pemerintah Kabupaten Kuningan, 2021). Kemudian tahun 2017, Kementerian Pariwisata Indonesia memberikan kepada Desa Cibuntu yaitu *Community Based Tourism* (CBT) sebagai desa wisata terbaik di Indonesia peringkat kedua (Pusparani & Rianto, 2021). Desa Cibuntu juga banyak atraksi wisata seperti kolam renang, air terjun, dan *camping ground*, dimana wisatawan dapat melihat dan menghirup udara segar dan alam yang asri dengan lengkapnya berbagai fasilitas (Kartika et al, 2019). Bila wisatawan yang datang selalu disajikan dengan tarian penyambutan, itu merupakan atraksi budaya dari Desa Cibuntu (Latianingsih et al, 2019). Suvenir kriya adalah produk seni yang dihasilkan Desa Cibuntu dari bahan kayu (Jurnalmedia.com, 2021).

Dengan banyak potensi daerah yang dimiliki Desa Cibuntu, kami memberikan pelatihan dan penyuluhan bagaimana cara Desa Cibuntu mendapatkan sertifikasi desa wisata. Sertifikasi desa wisata bertujuan agar desa wisata dapat memberikan kualitas destinasi wisata yang lebih baik agar dapat memuaskan para wisatawan sehingga wisatawan dan pemangku kepentingan dapat meningkatkan loyalitasnya pada desa wisata tersebut. Sertifikasi desa wisata berkelanjutan diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar pariwisata di sebuah desa dapat terjaga terus tanpa merusak alam sekitarnya dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan yang disinggak dengan 4K yang harus diterapkan oleh desa wisata (Kemenparekraf, 2021),

Kami sebagai tim pengabdian melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada para pengelola dan masyarakat Desa Wisata Cibuntu agar mereka lebih memahami konsep penjaminan mutu pengelolaan desa wisata yang baik meliputi proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*) memperoleh kepuasan. Pengelola dan masyarakat Desa Wisata Cibuntu juga dapat mengetahui proses pembuatan SOP sebagai salah satu bagian dari penjaminan mutu dan sertifikasi. Kegiatan ini diharapkan dapat berlangsung secara berkesinambungan dengan melibatkan dosen, mahasiswa dan dukungan dari seluruh warga dan pemangku kepentingan yang ada di Desa Cibuntu.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode kegiatan yang digunakan pada kegiatan ini adalah penyuluhan dan pelatihan. Materi yang disampaikan melalui PPT dan dicetak dan disebarkan ke peserta yang hadir. Setelah itu dibuka sesi tanya jawab untuk memperdalam penjelasan materi yang disampaikan kepada masyarakat atau peserta kegiatan. Pada kegiatan ini, Tim Pengabdian melakukan penyuluhan dan pelatihan bagaimana cara Desa Cibuntu mendapatkan sertifikat desa wisata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada tanggal 20-21 November 2021 di Pendopo Desa Cibuntu dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan 13.00, yang dihadiri 20 peserta mulai dari Kades Desa Cibuntu. Kegiatan ini dimulai dengan materi tentang perkembangan desa wisata dan pentingnya menjadi desa wisata dan pentingnya penjaminan mutu dalam pengelolaan desa wisata, serta strategi memperoleh sertifikasi desa wisata, juga pentingnya adanya SOP yang dibutuhkan sebagai standar prosedur pelaksanaan pengelolaan Desa Wisata agar terus dapat berkembang secara berkelanjutan. Para peserta terlihat sangat antusias mengikuti pelatihan dan penyuluhan ini karena pada saat pelatihan Desa Wisata telah melalui proses sertifikasi dan diberikan beberapa catatan dari asesor yang ada kaitannya dengan materi pelatihan dan penyuluhan ini.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Sertifikasi Pariwisata Berkelanjutan

Pemberian sertifikasi desa wisata untuk menentukan standar, status mutu dan kualitas sesuai dengan prosedur penilaian yang dilakukan oleh tim audit yang berasal organisasi sertifikasi yang menggunakan indikator dan kriteria yang berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan, meliputi keberlanjutan sosial, keberlanjutan budaya, keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan (Jadesta Pesona Indonesia, 2021).


Manfaat sertifikasi pariwisata berkelanjutan adalah (Jadesta Pesona Indonesia, 2021): (1) Meningkatnya sebuah kesadaran untuk masyarakat, swasta dan pemerintah untuk melaksanakan pariwisata berkelanjutan; (2) Mendukung lestariannya bumi dengan ramah lingkungan, dimana pelaku usaha pariwisata menyediakan produk atau jasa yang ramah lingkungan sehingga dengan hijauanya lingkungan, perjalanan yang direncanakan wisatawan dapat dilakukan dalam waktu yang panjang; (3) Rekognisi yaitu saat mengajukan permohonan izin/lisensi dan penghargaan memiliki standar kualitas berupa


standar operasional yang bermanfaat dan tinggi; (4) Bertanggung jawab adalah promosi dan pemasaran fokus pada produk yang berkelanjutan menciptakan kemitraan dan koneksi yang dapat meningkatkan nilai yang memperluas jangkauannya sebagai pariwisata yang berkelanjutan.

Prinsip Dasar Penyusunan SOP Desa Wisata

Desa wisata dapat dikelola dengan profesional secara efisien dan efektif adalah dengan menerapkan *standar operasional prosedur* (SOP) karena sebagai pedoman melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai Pokdarwis. SOP berisi prosedur kerja yaitu urutan-urutan yang telah dibuat dalam melakukan suatu pekerjaan dimanaterdapat tahapan demi tahapan yang harus dilalui sehingga terlihat jelas adanya aturan yang harus ditaati oleh orang yang akan menjalankan prosedur kerja pada bidang tugas yang telah mereka kerjakandan membuat suatu pekerjaan itu mudah dimengerti dan dipahami (Mahagangga et al, 2018)

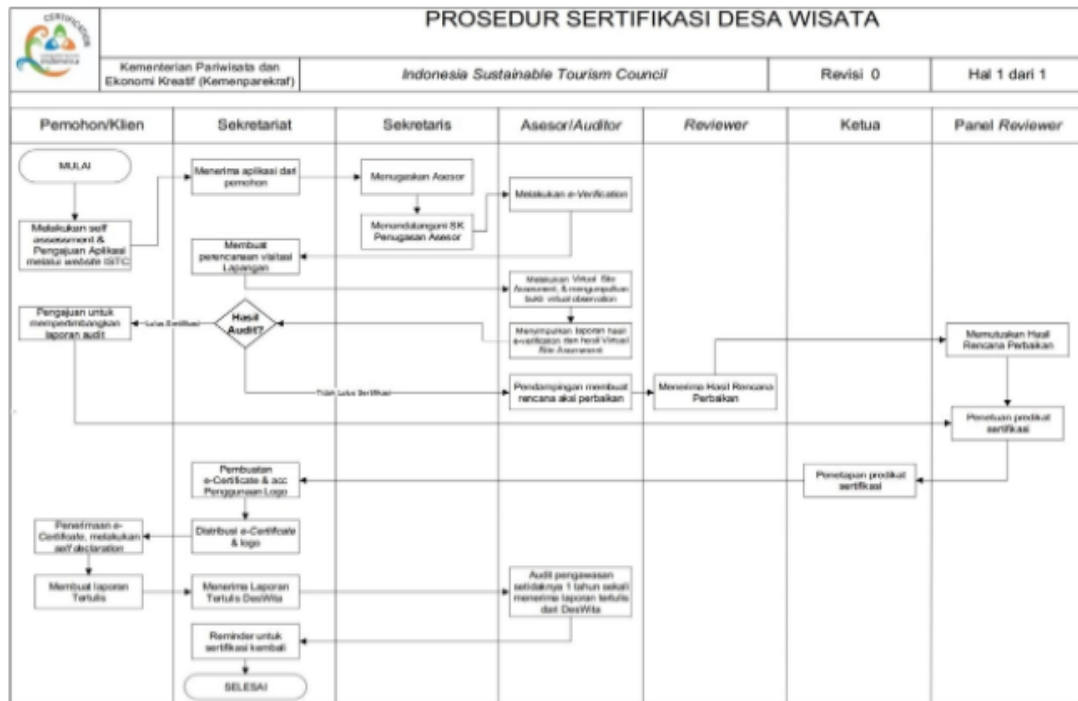
CONTOH SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMASAN MAKANAN	 TambahPinter.com <small>Jl. Karya Timur 29, Bitar 85189 www.lambahpinter.com</small>	No. DOKUMEN : TB.46-SOP-250520 MULAI BERLAKU : 25/05/2020 REVISI : 02 TGL. REVISI : - HALAMAN : 1 dari 1												
1. LATAR BELAKANG : 1. Makanan yang sehat sesuai dengan visi dan misi perusahaan 2. Kualitas pengemasan salah satu faktor daya tarik konsumen														
2. TUJUAN : Menata proses pengemasan makanan yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas perusahaan														
3. RUANG LINGKUP : Proses pengemasan														
4. TANGGUNG JAWAB : 1. Operator pengemasan 2. Supervisor pengemasan 3. Manager produksi														
5. UNIT KERJA TERLIBAT : 1. Bagian produksi 2. Bagian gudang 3. Bagian distribusi														
6. PROSEDUR PELAKSANAAN : 1. Operator pengemasan wajib mematuhi ketentuan teknis peralatan yang digunakan 2. Proses pengemasan harus dilaksanakan dengan hati-hati untuk meminimalkan kegagalan pengemasan produk 3. Pekerjaan pengemasan harus segera dikerjakan ketika bagian produksi telah menyerahkan hasil pekerjaannya 4. Operator pengemasan harus memeriksa setiap barang yang dikemas dengan teliti 5. Bila produk yang akan dikemas ditemukan cacat produksi maka operator harus memisahkan dan segera melaporkan ke Supervisor untuk segera ditindak lanjuti														
7. REKAMAN : 1. Form serah terima 2. Form cacat produksi														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">DIBUAT</th> <th style="width: 33%;">DIPERIKSA</th> <th style="width: 33%;">DISETUIJI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NAMA :</td> <td>NAMA :</td> <td>NAMA :</td> </tr> <tr> <td>JABATAN :</td> <td>JABATAN :</td> <td>JABATAN :</td> </tr> <tr> <td>TANDA TANGAN :</td> <td>TANDA TANGAN :</td> <td>TANDA TANGAN :</td> </tr> </tbody> </table>			DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUIJI	NAMA :	NAMA :	NAMA :	JABATAN :	JABATAN :	JABATAN :	TANDA TANGAN :	TANDA TANGAN :	TANDA TANGAN :
DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUIJI												
NAMA :	NAMA :	NAMA :												
JABATAN :	JABATAN :	JABATAN :												
TANDA TANGAN :	TANDA TANGAN :	TANDA TANGAN :												

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pemeriksaan Akhir Pra Pengecoran	 TambahPinter.com <small>Jl. Karya Timur 29, Bitar 85189 www.lambahpinter.com</small>	No. DOKUMEN : TB.56-SOP-250520 MULAI BERLAKU : 25/05/2020 REVISI : 01 TGL. REVISI : - HALAMAN : 1-1												
1. LATAR BELAKANG a. Pekerjaan cor struktur merupakan pekerjaan yang perlu perhatian khusus b. Perlu ada pemeriksaan yang teliti sebelum dilaksanakan pengecoran														
2. TUJUAN Mengatur pola pemeriksaan pra pengecoran untuk hasil yang efektif dan efisien														
3. RUANG LINGKUP Petas pengecoran konstruksi sebelum dilaksanakan pengecoran														
4. TANGGUNG JAWAB a. Pengawas lapangan b. Supervisor pengawas lapangan c. Pelaksana lapangan														
5. UNIT KERJA TERLIBAT a. Pelaksana konstruksi di lapangan b. Sub kontraktor yang terkait c. Logistik lapangan														
6. PROSEDUR PELAKSANAAN a. Pengawas lapangan menerima memo dan informasi lisan tentang jadwal pengecoran bidang konstruksi tertentu b. Pengawas lapangan memeriksa kesesuaian dimensi, jarak dan jenis bahan antara gambar dan spesifikasi bahan dengan kondisi yang ada di lapangan c. Pengawas lapangan memeriksa kelengkapan bekisting dan perancah untuk mengantisipasi beratnya cor d. Pengawas lapangan memeriksa kesiapan pelatan, jumlah peralatan dan jumlah personel yang akan terlibat dalam pengecoran e. Pengawas lapangan wajib memberikan arahan atau catatan tertentu bila ada ketidaksesuaian dan bila dilihat ada yang tidak senyatanya secara teknis konstruksi f. Pengecoran baru bisa dilaksanakan bila pengawas lapangan memberikan instruksinya melalui memo yang tersedia.														
7. REKAMAN a. Form pengajuan pengecoran b. Form pelaksanaan pengecoran c. Form laporan cuaca														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">DIBUAT</th> <th style="width: 33%;">DIPERIKSA</th> <th style="width: 33%;">DISETUIJI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NAMA :</td> <td>NAMA :</td> <td>NAMA :</td> </tr> <tr> <td>JABATAN :</td> <td>JABATAN :</td> <td>JABATAN :</td> </tr> <tr> <td>TANDA TANGAN :</td> <td>TANDA TANGAN :</td> <td>TANDA TANGAN :</td> </tr> </tbody> </table>			DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUIJI	NAMA :	NAMA :	NAMA :	JABATAN :	JABATAN :	JABATAN :	TANDA TANGAN :	TANDA TANGAN :	TANDA TANGAN :
DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUIJI												
NAMA :	NAMA :	NAMA :												
JABATAN :	JABATAN :	JABATAN :												
TANDA TANGAN :	TANDA TANGAN :	TANDA TANGAN :												

Gambar 2. Contoh Pembuatan SOP Desa Wisata
Sumber: (Jadesta Pesona Indonesia, 2021)

Dengan adanya standar operasional prosedur kerja di Pokdarwis maka dapat dilakukan evaluasi dan peningkatan kualitas kerja yang lebih baik seiring dengan berjalannya waktu. Standar operasional prosedur ialah suatu rincian tertulis dalam bentuk dokumen yang berisi semua aktivitas dan instruksi yang dijalankan dengan berulang, periodik serta rutin. Tujuannya agar satuan unit kerja dapat membuat komitmen tentang pekerjaan yang dilakukan dapat terorganisir dengan jelas dan baik agar masing-masing anggota dapat menjaga kualitas kinerja dengan teratur (Andiani et al, 2020). Pada gambar 2 adalah contoh pembuatan SOP desa wisata, hal-hal yang perlu ditampilkan pada SOP adalah identitas, judul, nomor dokumen, mulai pemberlakuan, revisi, tanggal revisi, halaman, latar belakang, tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang, satuan kerja, prosedur pelaksanaan, rekaman, pengesahan dan *flow chart*.



Gambar 3. Prosedur Sertifikat Desa Wisata
Sumber: (Jadesta Pesona Indonesia, 2021)

Prosedur Sertifikat Desa Wisata

Setiap pelaku usaha dan pariwisata dapat segera mendaftar hanya dengan melakukan beberapa langkah yaitu (Kemenparekraf, 2021): (1) Para pengelola usaha pariwisata memiliki keinginan melakukan penilaian mandiri dengan pendaftaran secara daring laman resmi chse.kemenparekraf.go.id, kemudian isi formulir identitas usaha. (2) Melakukan pengunduhan format surat pernyataan deklarasi mandiri sebagai pernyataan resmi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, kemudian bisa divalidasi langsung; (3) Melakukan penilaian oleh organisasi sertifikasi yang memiliki kemampuan, di bidang sistem manajemen lingkungan serta keselamatan kerja dan kesehatan; (4) Pengelola usaha pariwisata yang lulus penilaian memperoleh sertifikat CHSE dari organisasi sertifikasi, yang diberi label *I Do Care* oleh Kemenparekraf; (5) Gratis, untuk tahap awal ini, sertifikasi CHSE akan diprioritaskan untuk usaha restoran, hotel, rumah makan, homestay, pondok wisata, desa wisata, wisata arung jeram, wisata selam, lapangan golf, ekowisata, wisata budaya.

KESIMPULAN

Kegiatan PKM ini diharapkan dapat berlangsung secara berkesinambungan dengan melibatkan dosen, mahasiswa dan dukungan dari seluruh warga dan pemangku kepentingan yang ada di Desa Cibuntu. Sertifikasi desa wisata merupakan salah satu strategi menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru di sektor pariwisata. Di saat pandemi Covid-19 seperti ini, sektor pariwisata yang paling terpengaruh mengalami penurunan.

Dengan adanya sertifikasi desa wisata merupakan strategi baru agar desa wisata mampu menghadapi masa adaptasi kebiasaan baru. Selain itu sertifikasi desa wisata diandalkan untuk memulihkan ekonomi nasional pasca-Covid-19, sektor pariwisata juga diharapkan mampu menjadi pendorong perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam

hal menjaga kebersihan dan kesehatan. Melalui sertifikasi desa wisata itulah, pelaku industri pariwisata harus meningkatkan protokol kesehatan dan kebersihan di lokasi usahanya, demi memenuhi tuntutan konsumen usai pandemi berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiani, N. D., Widiastini, N. M. A., & Rahmawati, P. I. (2020). Pendampingan Penyusunan Sop Pramuwisata Bagi Pokdarwis di Desa Pedawa. *Proceeding Senadimas Undiksha*: 1535-1542.
- Jadesta Pesona Indonesia. (2021). Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan. Diakses Pada 12 Oktober 2021, dari <https://jadesta.com/sertifikasi>.
- Jurnalmedia.com. (2021). Anugerah Desa Wisata 2021, Sandiaga Uno Kunjungi Desa Wisata Cibuntu. Diakses 5 Oktober, dari <https://jurnalmedia.com/pariwisata/anugerah-desa-wisata-2021-sandiaga-uno-kunjungi-desa-wisata-cibuntu/>.
- Kartika, T., Afriza, L., & Fajri, K. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation*, 2(1): 11-24.
- Kemendikbud. (2021). Program sertifikasi CHSE. Diakses Pada 7 November 2021, dari <https://chse.kemendikbud.go.id/>.
- Latianingsih, N., Mariana, I., & Suryanti, D. W. (2019). Model Pengembangan Kebijakan Desa Wisata dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Homestay di Desa Wisata Cibuntu Kabupaten Kuningan Jawa Barat. *Law & Justice Jurnal*, 4(1): 35-38.
- Mahagangga, I.G.A.O., Sukana, M., Suryawan, I. B., & Anom, I. P. (2018). Pengembangan Desa Wisata di Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi Bali. *Buletin Udayana Mengabdikan*, 17(1): 177-186.
- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. (2021). Potensi Pariwisata Desa Cibuntu. Diakses Pada 12 November 2021, dari https://jabarprov.go.id/index.php/potensi_daerah/detail/146.
- Pemerintah Kabupaten Kuningan. (2021). Menparekraf Sandiaga Uno Lakukan Kunjungan Kerja Ke Desa Wisata Cibuntu. Diakses Pada 15 November 2021, dari <https://www.kuningankab.go.id/berita/menparekraf-sandiaga-uno-lakukan-kunjungan-kerja-ke-desa-wisata-cibuntu>.
- Pusparani & Rianto. (2021). Implementasi Konsep Pentahelix Dalam Pengembangan Desa Wisata Cibuntu. *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata*, 4(1), 24-31.